

TANTANGAN PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pertemuan 5

Isti PurwiTyas Utami, M.Ikom



CIRI PRODUK JURNALISTIK

- Diproduksi lembaga berbadan hukum
- Dibuat wartawan profesional (kapasitas dan etika)
- Berlaku pertanggungjawaban *waterfall responsibilities*
- Ada penanggungjawab yang bisa dipertanggungjawabkan
 - Ada tembok api (*Firewall*)



DELIK PERS

- Suatu pernyataan pikiran yang dapat dipidanakan. Ditujukan kepada publik dan dilakukan dengan pers.
- Dalam tulisan yang bersifat pidana → lima orang yang dinilai tersangkut :
 - Redaktur
 - Penulis
 - Penerbit
 - Pencetak
 - Pengedar
- Redaktur → turut mengubah (Werstuk), tidak mengubah (Pleger)
- Syarat pidana → redaktur tahu tulisan dan sadar sebagai pidana
- Pertanggungjawaban air terjun (model Belgia) → *Single liability*, hanya penulis (1 orang) yang dapat dipertanggungjawabkan pidana delik pers.
- Model pertanggungjawaban lain → Director of publication (Perancis) dan Responsible Editor (Eropa Tengah)

KASUS MEME TIRTO.ID

Senin 18 Maret 2019, 20:11 WIB

Pemred Tirto.id: Kami Khilaf dengan Meme Twitter, Kami Minta Maaf

Noval Dhwinuari Antony - detikNews



Ilustrasi (Foto: dok. Getty Images)

Jakarta - Pemimpin Redaksi *Tirto.id* Sapto Anggoro mengaku pihaknya bertanggung jawab dan memahami kekecewaan warga Nahdlatul Ulama (NU) atas meme yang diunggah akun Twitter *Tirto.id* yang dinilai telah melecehkan NU. Sapto mengakui pihaknya khilaf atas unggahan tersebut.

- *Begini kalimat utuhnya: "Kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi hoaks. Karena hoaks merusak tatanan bangsa Indonesia. Melawan dan memerangi fitnah, seperti kalau Jokowi terpilih kementerian agama dibubarkan, kementerian agama dilarang, azan dilarang, zina dilegalisir. Saya bersumpah demi Allah, selama hidup saya akan saya lawan upaya-upaya untuk melakukan itu semua."*

Namun karena pernyataan sebelum dan setelahnya dipotong, dan yang dikutip hanya soal zina bisa dilegalisir, maka konteks klarifikasi yang sedang dilakukan Ma'ruf menjadi raib. Bukan hanya itu, penggalan kalimat "zina [bisa] dilegalisir" yang dihadirkan secara visual dalam bentuk meme bahkan seolah-olah menjadi pernyataan Ma'ruf Amin.



Nadirsyah Hosen @na_dirs · 1 jam
Saya kecewa dengan @TirtoID yg ternyata tidak menerapkan #SaringSebelumSharing

Pelintirannya terhadap pernyataan KH Ma'ruf Amin sangat kelewatan dan menunjukkan Tirto bukan media yg bisa dipercaya. Meski sdh minta maaf dan merevisi meme ini, tapi kesalahannya sangat fatal



73 743 747



TINDAK PIDANA PERS

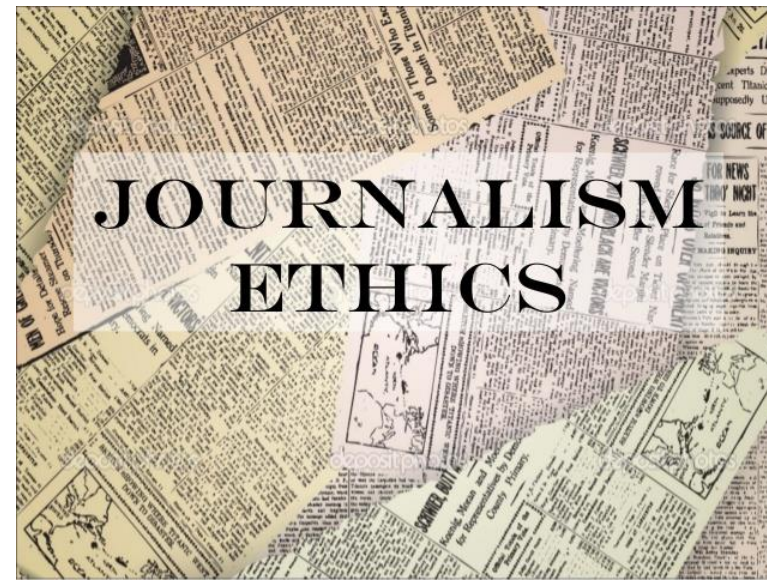
- Penghinaan → Pasal 310 (2) KUHP
- Fitnah → Pasal 311 KUHP
- Penghinaan ringan → Pasal 315 KUHP
- Pornografi → Pasal 282 (2) & 533 KUHP
- Penghasutan → Pasal 160 KUHP
- Pernyataan kebencian/ permusuhan terhadap pemerintah → Pasal 154 KUHP , terhadap golongan tertentu → Pasal 156 KUHP



KRITIK TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK TRADISIONAL

Iklim jurnalisme dewasa ini ditandai perbedaan pendapat yang mendalam:

1. Perbedaan pendapat muncul dalam bidang jurnalisme → empat teori pendekatan etika jurnalistik
2. Perbedaan pendapat berasal dari kajian di luar jurnalisme → politik, sosiologi, budaya dan komunikasi
3. Perbedaan pendapat akibat perubahan teknologi dan sosiologi → jurnalisme media baru



PERBEDAAN PENDAPAT DI DALAM KAJIAN JURNALISME

Empat Pendekatan Etika Jurnalisme

- TEORI LIBERAL → Pers Independen, fungsi *watch dog*
- TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN OBYEKTIVITAS → tidak hanya bebas tetapi pertanggungjawaban atas kebenaran dan independen.
- TEORI TAFSIR DAN AKTIVISME → pemberi informasi, penafsir dan fungsi advokasi.
- TEORI KOMUNITAS DAN KEPEDULIAN → mencipta ruang dialog, interpretif bersama warga negara untuk tujuan transformasi.



PERBEDAAN PENDAPAT DI LUAR KAJIAN JURNALISME

- Etika jurnalisme tradisional kurang peka terhadap hubungan antara diskursus etis dan kekuasaan, dominasi ekonomi dan budaya Barat, skeptisisme pasca-modern terhadap kebenaran dan obyektivitas.
- Pertanyaan yang diajukan:
 - Bagaimana menafsirkan dan mempraktikkan etika jurnalisme sehingga membelokkan dari diskursus etik ke ideologi etis yang ada di balik dominasi dan ekonomi Barat?
 - Bagaimana prinsip-prinsip jurnalisme universal mengakui adanya perbedaan politik, ekonomi dan budaya?



PERBEDAAN PENDAPAT TERKAIT PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

1. Jurnalisme baru memiliki nilai-nilai berbeda dengan jurnalisme tradisional.
2. Jurnalisme media baru menggugat nilai kebenaran dan objektivitas pada media tradisional.
3. Sinisme terkait media yang sesungguhnya mencari keuntungan → *Impartial informers*.



KRITIK TERKAIT KEBENARAN & OBJEKTIVITAS ETIKA JURNALISME TRADISIONAL

1. Objektivitas adalah ideal yang dituntut pada setiap wartawan; seringkali menyerupai mitos daripada kenyataan.
2. Objektivitas kendati dalam sampai batas tertentu dapat dicapai namun seberapa penting?, karena memaksa wartawan taat pada pola pemberitaan tertentu?
3. Objektivitas membatasi terciptanya pers yang bebas; demokrasi menuntut pers bebas yang membuka ruang bagi adu gagasan.



KRITIK TEORI KRITIS

- Media sarana pembentukan opini publik yang berdampak pada perubahan sosial politik, tidak lepas dari relasi kekuasaan.
- Teori kritis menolak upaya untuk memaksakan gagasan-gagasan sistem hegemonik Barat dan mencurigai klaim nilai-nilai universal karena mengandaikan esensialisme dan menafikan perbedaan (mendistorsi "yang lain")



MASALAH PENEGAKAN ETIKA PERS

(Stanley Adi Prasetyo)

PERS PALSU

FENOMENA
MEDIA ABAL-
ABAL

FENOMENA
WARTAWAN
ABAL-ABAL

PERS KUNING

LEMAH KAPASITAS

TIDAK IKUT
PENDIDIKAN
JURNALISTIK

JALAN PINTAS
DALAM TUGAS

TIDAK PATUHI
KODE ETIK
JURNALISTIK

TIDAK SESUAI
STANDAR
PERILAKU

KEPENTINGAN PEMILIK

ISI MEDIA BIAS
KEPENTINGAN

TEROMPET



Ada Unsur Memeras, Pidana Menanti Wartawan Abal-abal
 9 February 2018 1:50 pm







Dewan Pers: Banyak Media Tak Berimbang dalam Pemberitaan Pemilu

Reporter: **Antara**

Editor: **Tulus Wijanarko**

Rabu, 16 Januari 2019 17:08 WIB

0 KOMENTAR



30



1



32



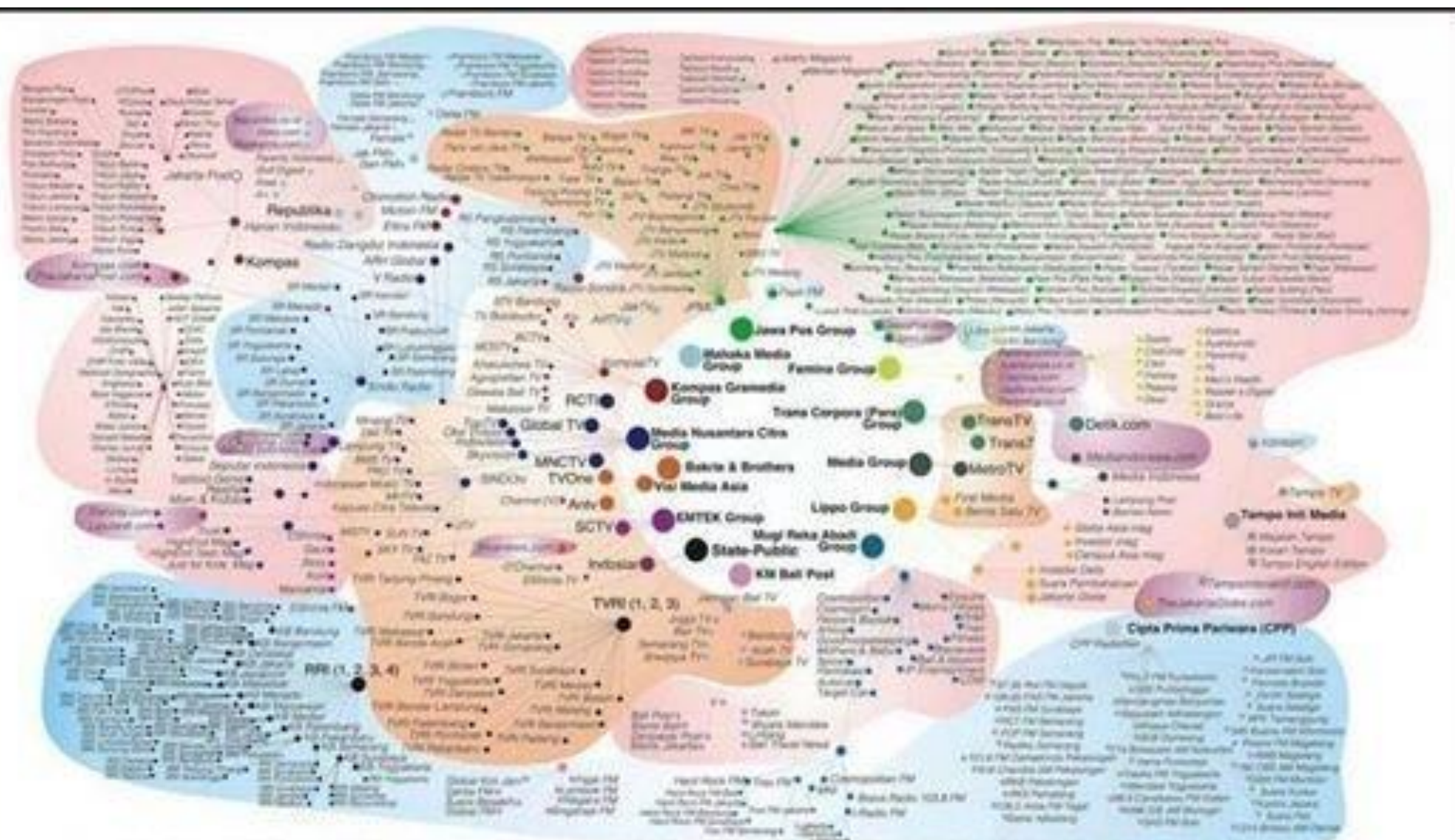
Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian (ISPPi) bertemu dengan Dewan Pers di gedung Dewan Pers, Jakarta, 4 Oktober 2017. Pertemuan ini membahas artikel "Musuh dalam selimut KPK" di majalah TEMPO. Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers menyatakan masih banyak media yang tidak berimbang dalam memberitakan masa kampanye **Pemilu** Presiden dan Legislatif 2019. "Selama enam bulan terakhir ada 16 media yang telah diadakan kepada kami karena pemberitaannya tidak berimbang," Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, di Surabaya, Selasa, 15/1.

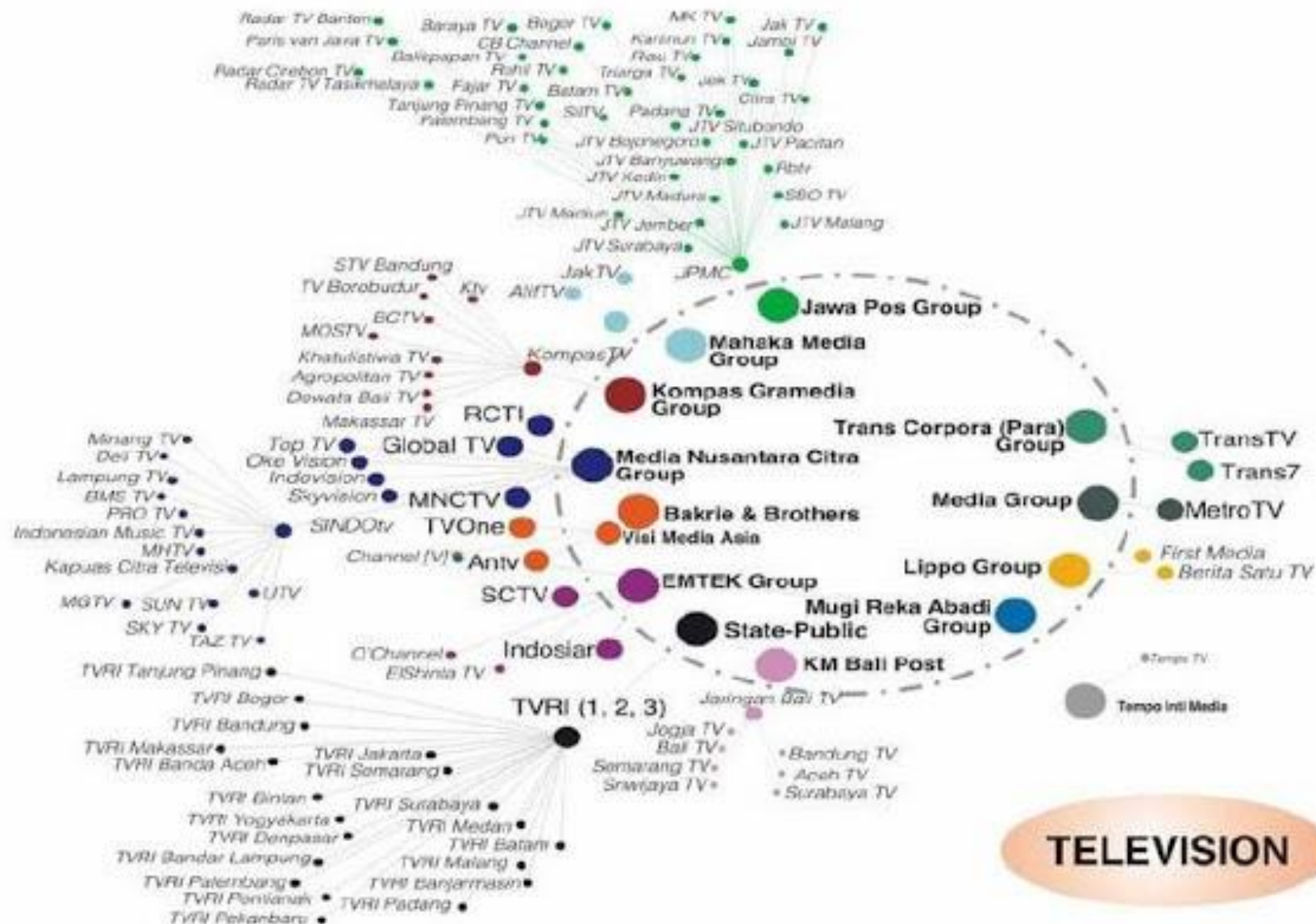
BOIKOT

Jawa Pos

KORAN TEMPO



MAP OF MEDIA CONCENTRATION IN INDONESIA
 By MERLYNA LIM ©2012



TELEVISION

MAP OF MEDIA CONCENTRATION IN INDONESIA
 By MERLYNA LIM, ©2012



MAP OF MEDIA CONCENTRATION IN INDONESIA
 By MERLYNA LIM, ©2012



PRINT

MAP OF MEDIA CONCENTRATION IN INDONESIA
By MERLYNA LIM, ©2012

SEJUMLAH TANTANGAN DI ERA DIGITAL

(Jane B. Singer, 2011)

- Terkait *Truth Telling* → *Post Truth, Liquid news, Immediacy, Interactivity*
- Terkait nilai dasar imparialitas → sikap tidak terlibat (*detachment*) di era digital membuat wartawan seperti terisolasi. Banyak diantara mereka menulis blog.
- Terkait nilai dasar akuntabilitas → transparansi dan keterbukaan, jaringan yang terhubung (*links*) menjadi norma sentral.



PENGAWASAN
DALAM
PELAKSANAAN
KERJA
JURNALISTIK

INTERNAL

OMBUDSMAN
Internal Media
Eksternal Media

EKSTERNAL

KELOMPOK
PEMANTAU
MEDIA
INDEPENDEN

DEWAN PERS

ETIKA JURNALISME DAN KEPENTINGAN PUBLIK

(Jeremy Iggers, 1999)

- Jurnalisme yang menunjang kepentingan publik dan jurnalisme bersama publik.
- Karya yang menghasilkan buah dalam etika jurnalisme bukanlah etika yang berkulat dalam teori moral abstrak melainkan dalam wilayah politik yang melibatkan aliansi wartawan dan publik.



ETIKA JURNALISME DAN KEPENTINGAN PUBLIK

(Jeremy Iggers, 1999)

Pengembangan jurnalisme publik enurut Jay Rosen, guru besar jurnalisme New York University, mengundang wartawan untuk:

1. Menyapa orang sebagai warganegara, partisipan potensial dalam urusan publik daripada sebagai korban atau penonton;
2. Membantu komunitas politik berusaha memecahkan masalah dan bukan hanya mengetahui apa yang menjadi masalah publik;
3. Memperbaiki iklim diskusi publik daripada sekedar menonton;
4. Membantu agar kehidupan publik menjadi lebih baik, sehingga menarik perhatian warga masyarakat untuk lebih terlibat.

ETIKA JURNALISME DAN KEPENTINGAN PUBLIK

(Jeremy Iggers, 1999)

Beberapa pendekatan dalam pengembangan jurnalisme publik:

1. Pendekatan yang menekankan deliberasi publik;
2. Pendekatan yang menekankan keterlibatan komunitas dalam menanggapi masalah publik;
3. Pendekatan yang menekankan proyek bersama yang perlu ditangani dalam masyarakat;
4. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai jurnalisme publik dalam kegiatan rutin editor pemberitaan;
5. Pendekatan yang melihat jurnalisme publik sebagai jurnalisme tentang publik;
6. Pendekatan yang melihat jurnalisme sebagai jurnalisme bersama publik.

Referensi

- Otto, Kim., Köhler, Andreas (eds). 2018. Trust in Media and Journalism: Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe. Springer VS.
- Kovach, Bill. Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of Journalism. Three Rivers Press.
- Siregar, RH., Ignatius, Haryanto. 2006. Membangun Kebebasan Pers yang Beretika. Dewan Pers, Yayasan Tifa.
- Yayasan Bakti, 2017. Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, Yayasan Bakti.
- RPS dan RTM Matakuliah Hukum & Etika Jurnalisme, UPJ